

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPB Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

Pengaruh PNPB Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

Resha Moniyana Putri¹, Toto Gunarto², Ambya²

¹ : Alumni Magister Ilmu Ekonomi Unila

² : Dosen FEB Unila

ABSTRACT

The Influences Of National Program For Community Empowerment And Regional Expense Budget Allocation For Education, Health, And Public Work To Poverty In Lampung Province

Poverty is a main problem in this country. Poverty mitigation is conducted by national government by publishing National Program for Community Empowerment (or PNPB) that involves public participation directly and regional government to mitigate poverty by allocating Regional Expense Budget through sectors of education, health and infrastructure. Lampung province has biggest poor population in Sumatera Island especially in rural areas, so that it receives fund from PNPB. The objective of this research was to analyze regional government expense for poverty in Lampung province by using indicators of poor people population, national government expense allocation for PNPB, and regional government expense allocation for sectors of education, health and public work. The results showed that PNPB had negative influence to poverty in Lampung province. Regional Income and Expense Budget (APBD) allocation for education sector did not influence significantly to poverty in Lampung province. Regional Income and Expense Budget (APBD) allocation for health sector had negative influence to poverty level for next one year in Lampung province. Regional Income and Expense Budget (APBD) allocation for public work sector had negative influence to poverty in Lampung province.

Keywords : Poverty, PNPB, APBD, Education, Health, Public Work

Pendahuluan

Latar belakang

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, yang sesuai dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ukuran kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan suatu daerah. Menurut Esmara (1986) kemiskinan ekonomi dapat diartikan sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Kemiskinan adalah ketiadaan satu atau beberapa kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk memperoleh fungsi minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini termasuk tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk memperoleh kecukupan makanan, pakaian, atau tempat berlindung (kemiskinan karena pendapatan) atau tidak mampu mengobati penyakit ke sarana kesehatan (kemiskinan karena kesehatan yang buruk), juga tidak memiliki akses terhadap pendidikan, partisipasi politik, atau peran didalam bermasyarakat, sehingga perlu adanya upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Upaya untuk memperkuat kemampuan masyarakat lapisan bawah (kelompok miskin) yang belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan dan membutuhkan pertolongan agar memiliki daya, kemandirian, keswadayaan dan partisipasi..

Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan pemerintah Indonesia demi untuk mengeluarkan penduduk miskin dari jurang kemiskinan akibat krisis, seperti melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007

dengan melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan .

Propinsi Lampung untuk wilayah Sumatera merupakan propinsi kedua terbesar dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.219.000 orang pada tahun 2012 yaitu sebesar 237.900 orang di kota dan 981.100 orang di pedesaan, sedangkan jumlah penduduk miskin terbesar pertama di Sumatera adalah provinsi Sumatera Utara dengan besaran 1.378.400 orang yang tersebar 669.400 orang di kota dan 709.100 orang di desa (Tabel 1). Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa propinsi Lampung memiliki penduduk miskin di pedesaan terbesar se- Sumatera.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin menurut Propinsi (se-Sumatera) Tahun 2012

Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)		
	Kota	Desa	Kota+Desa
Aceh	16,54	71,11	87,66
Sumatera Utara	66,94	70,91	137,84
Sumatera Barat	12,43	27,36	39,79
Riau	15,64	32,49	48,13
Jambi	10,53	16,47	27,01
Sumatera Selatan	36,76	67,44	104,2
Bengkulu	9,27	21,78	31,05
Lampung	23,79	98,11	121,9
Bangka Belitung	2,4	4,62	7,02

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Begitu pula dengan persentase jumlah penduduk miskin pedesaan se-Sumatera, Provinsi Lampung pada tahun 2012 desa dan kota terbesar yaitu 19, 73 persen, dengan presentasi untuk jumlah penduduk di desa sebesar 23, 77 persen dan presentasi jumlah penduduk kota sebesar 11,61 persen. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan untuk Provinsi Lampung merupakan terbesar di Pulau Sumatera. Namun presentase penduduk miskin di Propinsi Lampung mengalami penurunan sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, yaitu sebesar 22,73 persen pada tahun 2009, kemudian turun menjadi 22,25 persen pada tahun 2010, terus menurun kembali sebesar 20,13 persen pada tahun 2011, dan hingga turun lagi menjadi 19,73 persen pada tahun 2012. Lihat Tabel 2.

Tabel 2. Persentase Jumlah Penduduk Miskin se- Sumatera Tahun 2009-2012

Propinsi	TAHUN											
	2009			2010			2011			2012		
	Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)			Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)			Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)			Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa									
Aceh	7,73	15,80	13,03	7,65	15,70	12,96	8,24	16,65	13,87	8,07	17,23	14,19
Sumatera Utara	29,19	18,05	21,88	30,39	18,29	22,41	32,36	18,31	22,96	32,66	17,18	22,31
Sumatera Barat	4,91	6,97	6,26	4,68	7,38	6,46	6,58	6,99	6,85	6,06	6,63	6,44
Riau	9,57	6,71	7,70	9,21	6,64	7,52	6,64	7,88	7,47	7,63	7,87	7,79
Jambi	4,98	2,94	3,64	4,89	2,98	3,63	5,06	3,81	4,23	5,14	3,99	4,37
Sumatera Selatan	19,94	15,52	17,04	20,78	14,93	16,92	19,16	15,42	16,66	17,94	16,34	16,87
Bengkulu	4,99	4,59	4,73	5,17	4,74	4,88	4,46	4,83	4,71	4,52	5,28	5,03
Lampung	14,82	26,89	22,73	13,31	26,87	22,25	11,33	24,49	20,13	11,61	23,77	19,73
Bangka Belitung	1,22	1,06	1,12	0,97	1,05	1,02	1,19	1,08	1,12	1,17	1,12	1,14
Kepulauan Riau	2,66	1,46	1,87	2,96	1,43	1,95	4,98	0,54	2,01	5,20	0,60	2,12
Sumatera	100,00	100,00	100,00									

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Data diolah

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh program PNPM terhadap kemiskinan di Propinsi Lampung?
2. Bagaimana pengaruh alokasi APBD untuk pendidikan terhadap kemiskinan di Propinsi Lampung?
3. Bagaimana pengaruh alokasi APBD untuk kesehatan terhadap kemiskinan di Propinsi Lampung?
4. Bagaimana pengaruh alokasi APBD untuk pekerjaan umum terhadap kemiskinan di Propinsi Lampung?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh program PNPM terhadap kemiskinan di Propinsi Lampung

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPB Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

2. Untuk menganalisis pengaruh alokasi APBD bidang pendidikan terhadap kemiskinan di Propinsi Lampung
3. Untuk menganalisis pengaruh alokasi APBD bidang kesehatan terhadap kemiskinan di Propinsi Lampung
4. Untuk menganalisis pengaruh alokasi APBD bidang pekerjaan umum terhadap kemiskinan di Propinsi Lampung

Hipotesis Penelitian

Diduga pengaruh pendanaan secara bersama- sama melalui alokasi dana PNPB dan Alokasi APBD pada bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pekerjaan Umum terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung berpengaruh negatif namun pengaruh PNPB lebih besar daripada alokasi APBD

Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pendanaan mengenai pengentasan kemiskinan yang berasal dari BLM untuk PNPB dan anggaran daerah untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada kabupaten/ kota di Provinsi Lampung

Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai arti yang luas dan tidak mudah mengukurnya, dalam arti berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan aspek lainnya (Sumodiningrat, 1989). Specker (1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup (1) kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal, (2) gangguan dan tingginya risiko kesehatan, (3) risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya, (4) kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan (5) kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketertinggalan sosial, ketertinggalan dalam proses politik, dan kualitas pendidikan yang rendah.

Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial telah mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut: Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPB Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya. Maxwell (2007) menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidakberfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi), tiadanya keberlanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, dan adanya perampasan relatif (*relative deprivation*).

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan (SPK) sangatlah penting bagi daerah, karena akan menjadi acuan bagi semua pelaku baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerahnya. SPK Daerah adalah dokumen resmi yang berisi kesepakatan – kesepakatan antar *stakeholders* daerah (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk bersama – sama mengatasi masalah kemiskinan sesuai kondisi masing - masing daerah. Dokumen strategi ini berorientasi pada proses (bukan sekedar hasil), menyeluruh (*komprehensif*) dan berdemensi jangka menengah dan jangka panjang.

Dua Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan :

1. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, dimana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya maupun politik;
2. Mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa

$$Y = C + I + G + X - M.$$

Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variable-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variable G menyatakan pengeluaran pemerintah (Government expenditures), I investment, X-M adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan ini, dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.

Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga memperoleh penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Kebijakan-kebijaksanaan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara) disebut kebijakan fiskal.

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.

Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPB Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Pemberdayaan Masyarakat

Oakley dan Marsden, (1982) dalam Priyono dan Pranarka (1996), menyatakan pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memberikan kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif yang sebetulnya sudah dimiliki secara potensial untuk mengambil peran yang sejajar dengan mereka yang lebih berdaya. Dari uraian tersebut dapat dibedakan dua hal dalam pemberdayaan. *Pertama*, bahwa pemberdayaan sebagai upaya memberikan kekuatan atau kemampuan kepada individu atau kelompok agar lebih berdaya. Ada unsur luar (baik dalam bentuk lembaga atau individu) yang memberikan kekuatan sehingga punya kekuatan untuk dapat mengambil peran yang berharga bagi lingkungannya. *Kedua*, memunculkan kekuatan dan kemampuan individu dan kelompok yang selama ini masih terpendam. Melalui stimulasi dan memotivasi sehingga menumbuhkan kepercayaan pada dirinya akan kemampuan yang dimiliki. Priyono dan Pranarka (1996) menyebut kedua hal tersebut sebagai kecenderungan primer dan sekunder. Baik kecenderungan primer maupun sekunder akan merubah individu atau kelompok dari kondisi serba keterbatasan dan ketidakberdayaan menjadi lebih mampu untuk mendobrak segala keterbatasannya hingga lebih dapat mengembangkan dirinya. Proses pemberdayaan muncul dari kondisi sosial ekonomis yang dikotomis yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai (Hutomo, 200b). Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Strategi Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan ini difokuskan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Klaster Pertama

Terdiri dari kelompok program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin dengan sasaran rumah tangga sangat miskin (RTSM),

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPM Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin (RTHM). Program utamanya adalah Raskin, Jamkesmas, PKH dan Beasiswa Miskin.

2. Klaster Kedua

Merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin.

3. Klaster Ketiga

Adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tabel 9. Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Sasarannya

Program	Sasaran
1. Program Keluarga Harapan (PKH)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
2. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin
3. Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
4. Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin	Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Kelompok Masyarakat Umum
a. PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Masyarakat Perdesaan
b. PNPM Mandiri Perkotaan	Kelompok Masyarakat Perkotaan
b. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)	Kelompok Masyarakat Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program pembangunan berbasis masyarakat atau Community Driven Development (CDD), dirumuskan untuk membangun kemandirian masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Program ini dimulai pada tahun 2006 untuk

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPM Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

mengkoordinasikan dan mensinergikan beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh berbagai kementerian teknis. Integrasi program berbasis pemberdayaan masyarakat ke dalam PNPM Mandiri, memperkuat kemampuan masyarakat untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui fasilitasi dan pelatihan. Hibah langsung diberikan sebesar Rp1,5 sampai Rp3,0 miliar per kecamatan per tahun. Hibah tersebut disalurkan ke masyarakat di tingkat desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah disepakati sebagai hasil proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Bagian terbesar dari hibah desa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur transportasi desa. Selain membangun kemandirian masyarakat, pelaksanaan PNPM Mandiri juga mencerminkan pergeseran dari pendekatan proyek ke pendekatan program. Harmonisasi berbagai proyek ke dalam PNPM Mandiri telah mengurangi tumpang tindih kegiatan di tingkat lokal. Untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri, telah disusun pedoman umum serta petunjuk pelaksana khusus. Pedoman ini memberikan fondasi dasar dan mekanisme untuk memberdayakan masyarakat dan mengelola pelaksanaan semua kegiatan. Program ini juga akan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi yang menghubungkan MIS dari berbagai sub-program PNPM Mandiri dan mendukung analisis efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian APBD menurut Bastian (2006:189), "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik". Sementara yang dikemukakan oleh Nordiawan, dkk (2007:39), "APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah". Menurut Mardiasmo (2005:61), "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPB Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja". Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah". Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 januari sampai 31 desember". Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPMM Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, DJPK(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah) Kementerian Keuangan Indonesia, maupun sumber data sekunder lainnya. Data berupa data panel tahun 2007 hingga tahun 2012. Untuk data yang berasal dari APBN, APBD, dan data kemiskinan digunakan data periode 2007 sampai 2012. Selanjutnya, data-data yang telah diverifikasi dimasukkan dalam database Eviews. Pemilihan data akan didasarkan pada tingkat ruang fiskal dari APBD kabupaten di Lampung. Pemilihan data panel karena adanya keterbatasan banyaknya data bila dilakukan dengan *time series* maupun *cross section*.

Sampel Daerah Penelitian

Metode sampel yang di gunakan yaitu *purposivesampling* yaitu menetapkan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Pada penelitian ini kriteria yang digunakan adalah kabupaten yang mengikuti program PNPM Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung yang masa pemerintahannya lebih dari 10 tahun dan Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ukuran sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 8 kabupaten.

Definisi Operasional Variabel

1.Variabel dependent Kemiskinan,

Jumlah Penduduk Miskin (P)

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar(*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPM Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Sedangkan, garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. (BPS, 2013)

2. Variabel Independen Utama, yaitu dikelompokkan menjadi:

APBN (PNPM).

Alokasi ini mewakili upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan melalui anggaran PNPM. Pemilihan PNPM diantara program pengentasan kemiskinan lainnya yang dilakukan pemerintah pusat seperti jamkesmas, raskin, keluarga harapan, dan beasiswa pendidikan karena PNPM adalah program yang sasarannya adalah kelompok masyarakat umum tidak mengkhususkan kepada penduduk miskin sehingga dapat dibandingkan dengan APBD yang sasarannya juga adalah masyarakat umum. Alokasi PNPM yang digunakan adalah PNPM yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Urusan Bersama (DUB) sehingga mengeluarkan faktor APBD sebagai dana pendamping PNPM atau Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB). Adapun PNPM yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah PNPM Mandiri Pedesaan.

APBD

APBD yang dibagi atas tiga kelompok belanja, yaitu:

a) Pendidikan (PEND)

Alokasi ini mewakili upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan human capital investment melalui belanja daerah dalam urusan pendidikan;

b) Kesehatan (KES)

Alokasi ini mewakili upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui belanja daerah dalam urusan kesehatan.

c) Pekerjaan Umum (PU)

Alokasi ini mewakili upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan infrastruktur melalui belanja

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPMP Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

daerah dalam urusan pekerjaan umum. Guna menetralkan perbedaan jumlah penduduk antardaerah, alokasi belanja daerah di atas ditransformasikan menjadi data per kapita dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk kabupaten/kota masing-masing.

Spesifikasi Model Penelitian

Analisis data menggunakan model regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh program PNPMP (PNPMP), alokasi APBD bidang pendidikan (PEND), alokasi APBD bidang kesehatan (KES), alokasi APBD bidang pekerjaan umum (PU) terhadap kemiskinan yaitu jumlah penduduk miskin (P).

Adapun fungsi persamaan model yang akan diregresi adalah sebagai berikut:

$$P = f(\text{PNPMP}, \text{KES}, \text{PEND}, \text{PU})$$

dengan persamaan regresi

$$P_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{PNPMP}_{(t-k)} + \beta_2 \text{KES}_{(t-k)} + \beta_3 \text{PEND}_{(t-k)} + \beta_4 \text{PU}_{(t-k)} + \varepsilon$$

Keterangan :

P	= Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
PNPMP	= Alokasi dana PNPMP yaitu dana BLM (juta rupiah)
KES	= Alokasi APBD untuk Kesehatan (juta rupiah)
PEND	= Alokasi APBD untuk Pendidikan (juta rupiah)
PU	= Alokasi APBD untuk Pekerjaan (juta rupiah)
α	= Intersep
β	= Koefisien variabel bebas
ε	= Variabel gangguan
$t-k$	= lag tahun k

Hasil Perhitungan

Pengolahan data dengan menggunakan program komputer *Eviews 6* serta model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dan WCS LS (*White Cross Section Least Square*) menghasilkan perhitungan sebagai berikut :

Tabel Rangkuman Hasil Regresi Ordinary Least Square (OLS) dan White Cross Section Least Square (WCS LS)

Variabel	Coef	Std error	t-Stat.	Prob.	Coef	Std error	t-Stat.	Prob.	Keterangan
	OLS				WCS LS				
C	21.15112	5.006156	4.225022	0.0002	21.15112	3.357562	6.299546	0.0000	Signifikan*
LNPMPM	-0.459117	0.169079	-2.715393	0.0112	-0.459117	0.091618	-5.011223	0.0000	Signifikan*
LNPEND	0.085125	0.100580	0.846345	0.4045	0.085125	0.059876	1.421697	0.1662	Tidak Signifikan
LNKES(-1)	-0.229344	0.089872	-2.551915	0.0165	-0.229344	0.041955	-5.466431	0.0000	Signifikan*
LNPU	-0.317375	0.140127	-2.264908	0.0314	-0.317375	0.111394	-2.849119	0.0081	Signifikan*
<i>Squared</i>		0.918479				0.91847			
<i>F-Statistic</i>		28.67909AR				28.67909			
<i>Prob. (F-Statistic)</i>		0.000000				0.000000			
<i>DW Statistic</i>		1.886879				1.886879			

Sumber: Lampiran

Dari hasil perhitungan pada tabel 12 dapat dibandingkan hasil dari perhitungan dengan menggunakan metode WCS LS (*White Cross Section Least Square*) menghasilkan nilai *prob* yang lebih baik daripada menggunakan OLS (*Ordinary Leas Square*), oleh karena itu dalam pembahasan ini akan menganalisis hasil perhitungan dari metode WCS LS (*White Cross Section Least Square*)

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Pengaruh alokasi PNPM terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil estimasi regresi, nilai koefisien regresi PNPM adalah sebesar -0,459117 dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hal ini berarti, setiap peningkatan alokasi dana PNPM sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,459117 persen *ceteris paribus*. Hal ini membuktikan hipotesa penelitian bahwa alokasi dana PNPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Seperti halnya Oakley dan Marsden, (1982) dalam Prijono dan Pranarka (1996), menyatakan pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memberikan kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif yang sebetulnya sudah dimiliki secara potensial untuk mengambil peran yang sejajar dengan mereka yang lebih berdaya. Dalam hal ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang program

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPB Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

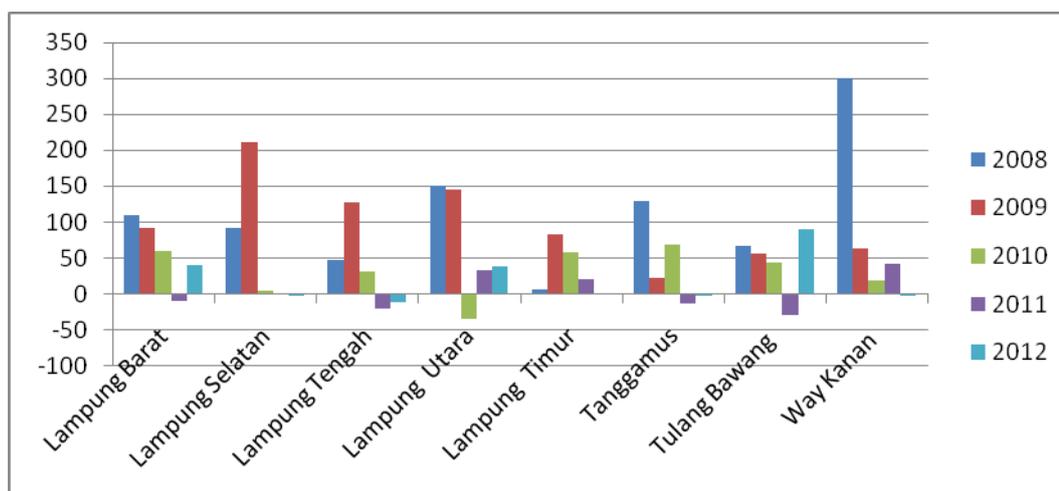
pembangunan berbasis masyarakat atau *Community Driven Development (CDD)*, dirumuskan untuk membangun kemandirian masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Sejalan dengan penelitian Adi S (2011) yang mengatakan bahwa PNPB memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian Rezeki DPS (2006) juga mengemukakan adanya peningkatan pendapatan telah terjadi peningkatan (dalam kurun waktu 6 bulan (sebelum dan sesudah program) yang berarti meningkatkan pendapatan sesudah program. Penelitian Siagian JE (2007) mengemukakan bahwa Program Pengembangan Kecamatan yang diukur dari penyediaan sarana sosial dasar, sarana ekonomi, dan lapangan pekerjaan berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian semeru menyatakan pula bahwa, PNPB Pedesaan sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk penyediaan infrastruktur di pedesaan. Hampir semua proyek *open menu* PNPB Pedesaan berbentuk infrastruktur. Sebagai mekanisme penyaluran pembangunan dari pusat ke desa, program ini sangat efektif dan efisien karena minimnya penemuan adanya penyimpangan dana PNPB.

Di Provinsi Lampung pertumbuhan alokasi dana untuk PNPB Pedesaan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 yang terlihat pada gambar 2, secara garis besar mengalami pertumbuhan yang positif seperti yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009 adanya kenaikan yang tinggi di Kabupaten Way Kanan sebesar 300 persen di tahun 2008 , Lampung Selatan sebesar lebih dari 200 persen di tahun 2009, serta kenaikan lebih dari 100 persen juga dialami oleh Kabupaten Lampung Utara, Tanggamus, dan Lampung Barat pada tahun 2008 dan 2009. Walaupun jumlah alokasi dana untuk tahun 2010 dan 2011 mengalami pertumbuhan negatif yang terjadi pada sebagian besar Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Tanggamus dan Lampung Barat namun naik kembali pada tahun 2012.

Gambar 2. Pertumbuhan alokasi dana PNPB Pedesaan Kabupaten di Provinsi Lampung(persen)



Sumber : Data diolah

Analisis Pengaruh alokasi APBD untuk sektor Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil estimasi regresi, nilai koefisien regresi Pendidikan (PEND) adalah sebesar 0,085125 dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hal ini berarti, setiap peningkatan pengeluaran bidang pendidikan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Sejalan dengan hasil estimasi tersebut, Schiller mengemukakan bahwa peningkatan keterampilan melalui jenjang pendidikan tidaklah selalu mampu mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini perlu diperhatikan kemampuan perekonomian negara untuk menyerap tenaga

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPB Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

kerja tersebut. Di satu pihak, peningkatan keterampilan baru merupakan salah satu penawaran sedangkan dilain pihak, tidak pula dapat diabaikan faktor permintaan terhadap tenaga kerja itu sendiri.(Esmara Hendra, perencanaan& pembangunan di Indonesia).

Kemudian Todaro juga mengemukakan alasan utama dari akibat buruk pendidikan formal terhadap distribusi pendapatan adalah adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan selama hidup. Korelasi ini khususnya berlaku bagi para pekerja yang dapat menyelesaikan sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi, dimana selisih pendapatannya dibandingkan dengan pekerja yang hanya menyelesaikan sebagian atau seluruh pendidikan dasar berada pada kisaran 300 persen sampai 800 persen. Biaya pribadi pendidikan dasar (khususnya jika dilihat dari biaya oportunitas/ peluang seorang pekerja anak bagi keluarga miskin) lebih tinggi bagi murid miskin ketimbang bagi murid dari keluarga lebih kaya, dan manfaat yang diharapkan dari pendidikan dasar (yang berkualitas lebih rendah) akan lebih rendah bagi murid miskin . Kedua fakta ini, biaya yang lebih tinggi dan lebih rendahnya manfaat pendidikan yang diharapkan berarti bahwa manfaat yang diperoleh keluarga miskin dari investasi pendidikan anak lebih rendah daripada keluarga lainnya. Oleh sebab itu, anak- anak dari keluarga miskin lebih besar kemungkinannya untuk putus sekolah pada tahun awal sekolah.

Karena tingginya biaya oportunitas/ peluang ini, anak- anak dari keluarga miskin sering kali bolos sekolah, sehingga prestasi belajarnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan anak- anak dari keluarga berpendapatan lebih tinggi. Hal ini diperparah oleh rendahnya kualitas sekolah tempat anak- anak dari keluarga miskin ini belajar – sarat dengan masalah rendahnya kualitas pembelajaran, guru yang sering mangkir, dan tidak memadainya fasilitas pendidikan. Terlepas dari adanya wajib sekolah dasar yang gratis di banyak negara berkembang, anak-anak dari kalangan keluarga miskin, khususnya di kawasan pedesaan, sering kali tidak dapat meneruskan pendidikan setelah beberapa tahun pertama pendidikan mereka. (Todaro. Pembangunan Ekonomi 2009, 2011)

Begitu pula dengan penelitian SEMERU yang menyatakan pengelolaan pelayanan pendidikan dasar di era otonomi daerah belum menunjukkan perubahan yang berarti, bahkan cenderung menurun. Persoalan di bidang pendidikan sejak sebelum pelaksanaan otonomi daerah hingga kini belum

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPB Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

bergeser, yaitu sekitar permasalahan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta rendahnya kualitas dan terbatasnya tenaga pengelola dan pelaksana dengan ketersebaran yang tidak merata.

Berkurangnya proporsi anggaran yang dikelola oleh pemerintah pusat atau sebaliknya bertambahnya proporsi anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) merupakan implikasi dari pengalihan kewenangan dari pusat ke daerah bukan karena meningkatnya jumlah alokasi dana. Hal ini juga nampak dalam alokasi anggaran pada sektor pendidikan. Peningkatan yang terjadi adalah karena adanya kenaikan anggaran untuk gaji guru yang semula merupakan pegawai pusat, serta pengelolaan kewenangan untuk pendidikan menengah yang disentralisasikan ke kabupaten/kota. Oleh karena itu tidak nampak adanya lonjakan peningkatan alokasi dana pada saat kita melihat pengalokasian secara lebih mikro, dalam hal ini alokasi dana operasional ke tingkat sekolah khususnya SD negeri. Bahkan adanya kecenderungan operasional SDN yang dipergunakan langsung untuk kegiatan belajar mengajar semakin berkurang. Akibatnya, kegiatan belajar murid berlangsung tidak optimal dan hasil pembelajarannya rendah. (SEMERU.2004)

Analisis pengaruh alokasi APBD untuk sektor kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung

Hasil estimasi regresi dengan data panel pada tabel 11 nilai koefisien regresi kesehatan (KES) $lag(-1)$ adalah sebesar -0.229344 dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hal ini berarti, setiap peningkatan pengeluaran kesehatan sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,22944 persen untuk tahun berikutnya *ceteris paribus*. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana APBD bidang kesehatan tidak signifikan di tahun tersebut, tetapi membuktikan hipotesa penelitian bahwa pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada 1 tahun berikutnya.

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.

Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Studi empiris yang sesuai dengan penelitian ini diantaranya Prasetya dkk (2012) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan secara signifikan mempengaruhi penurunan jumlah orang miskin di pedesaan. Sejalan dengan penelitian Adisantoso (2011) yang mengatakan bahwa belanja kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Begitu pula dengan Atmawikarta A (2002) mengatakan bahwa berbagai indikator kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi, memperlihatkan bahwa angka kesakitan dan kematian secara kuat berkorelasi terbalik dengan pendapatan.

Studi lain dilakukan oleh Bank Dunia yang membagi keadaan kesehatan antara kelompok penduduk berpenghasilan tinggi dan rendah pada negara-negara tertentu. Sebagai contoh, tingkat kematian anak pada kuartil termiskin di Bolivia dan Turki diperkirakan empat kali lebih besar dibandingkan dengan tingkat kematian pada kuartil terkaya. Dengan demikian kebijakan yang diarahkan untuk menanggulangi penyakit malaria dan kekurangan gizi secara langsung merupakan implementasi dari kebijakan mengurangi kemiskinan. Komitmen global untuk meningkatkan status kesehatan secara jelas dicantumkan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals-MDGs*). Tujuan pembangunan milenium tersebut antara lain: (1) menurunkan angka kematian anak sebesar dua pertiganya pada tahun 2015 dari keadaan tahun 1990; (2) menurunkan angka kematian ibu melahirkan sebesar tiga perempatnya pada tahun 2015 dari keadaan 1990; dan (3) menahan peningkatan prevalensi penyakit HIV/AIDS dan penyakit utama lainnya pada tahun 2015. Tujuan pembangunan milenium difokuskan terhadap pengurangan kemiskinan pada

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPB Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

umumnya dan beberapa tujuan kesehatan pada khususnya, sehingga terdapat keterkaitan antara upaya keseluruhan penurunan kemiskinan dengan investasi di bidang kesehatan.

Beberapa alasan meningkatnya beban penyakit pada penduduk miskin adalah: *Pertama*, penduduk miskin lebih rentan terhadap penyakit karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kecukupan gizi. *Kedua*, penduduk miskin cenderung enggan mencari pengobatan walaupun sangat membutuhkan karena terdapatnya kesenjangan yang besar dengan petugas kesehatan, terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan terbatasnya pengetahuan untuk menghadapi serangan penyakit.

Dari hasil data dan studi empiris yang ada menggambarkan bahwa alokasi dana bidang kesehatan memiliki pengaruh yang nyata dalam penurunan kemiskinan di provinsi Lampung.

Analisis pengaruh alokasi APBD untuk sektor PU terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil estimasi regresi pada tabel 11, nilai koefisien regresi Pekerjaan Umum (PU) adalah sebesar $-0,317375$ dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hal ini berarti, setiap peningkatan pengeluaran bidang pekerjaan umum sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar $0,317375$ persen *ceteris paribus*. Hal ini membuktikan hipotesa penelitian bahwa pengeluaran pemerintah untuk bidang pekerjaan umum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Sejalan dengan penelitian Fan dkk (2000) mengatakan bahwa Peningkatan infrastruktur di pedesaan memiliki kontribusi yang baik terhadap penurunan penduduk miskin di pedesaan. Kemudian PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN (Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional), telah ditetapkan struktur ruang nasional yang akan menjadi acuan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025 bahwa pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) *strategic goals*, yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan c) meningkatkan kualitas lingkungan.

A. Analisis Intersep Model Regresi *Fixed Effect*

Berdasarkan hasil estimasi regresi model penelitian diperoleh nilai koefisien *fixed effect* yang dapat terlihat pada tabel 1, yang menunjukkan bahwa 8 kabupaten di Provinsi Lampung memiliki efek intersep negatif dan positif.

Tabel. Nilai Koefisien *Fixed Effect* Pada Intersep Tiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten	<i>Cross Section Effect</i>
1. Lampung Barat	-0.710646
2. Lampung Selatan	0.532927
3. Lampung Tengah	0.399401
4. Lampung Utara	0.059842
5. Lampung Timur	2.129285
6. Tanggamus	-0.403284
7. Tulang Bawang	-1.292478
8. Way Kanan	-0.715046

Dari tabel menunjukkan kabupaten- kabupaten yang mempunyai nilai *fixed effect* yang negatif dapat diartikan bahwa jika variabel-variabel PNPm, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pekerjaan umum dianggap konstan, maka kemiskinan di kabupaten tersebut akan menurun sebesar: 0.710646 % untuk Kabupaten Lampung Barat; 0.403284 % untuk Kabupaten Tanggamus; 1.292478% untuk Kabupaten Tulang Bawang dan 0.715046 % untuk Kabupaten Way Kanan

Sementara itu terdapat beberapa kabupaten yang memiliki nilai *fixed effect* positif yang berarti jika variabel-variabel PNPm, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pekerjaan umum dianggap konstan, maka kemiskinan di kabupaten tersebut akan meningkat sebesar untuk 2.129285 % Kabupaten Lampung Timur; 0.532927% untuk Kabupaten Lampung Selatan ; 0.059842 % untuk Kabupaten Lampung Utara; 0.399401% untuk Kabupaten Lampung Tengah .

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis penelitian tentang pengaruh PNPB dan alokasi APBD untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. PNPB memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan yaitu peningkatan dana PNPB secara nyata dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung.
2. Alokasi APBD untuk bidang Pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung
3. Alokasi APBD untuk bidang Kesehatan di Provinsi Lampung memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan untuk 1 tahun berikutnya (*lag-1*) yang dapat diartikan bahwa alokasi dana APBD bidang kesehatan tidak berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan pada 1 tahun anggaran, namun dapat mengurangi kemiskinan di tahun berikutnya.
4. Alokasi APBD untuk bidang Pekerjaan umum memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan yang berarti setiap peningkatan alokasi APBD untuk bidang Pekerjaan Umum dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang dapat disampaikan untuk mengurangi kemiskinan kebijakan yang dapat Pemerintah lakukan adalah sebagai berikut:

1. Dengan lebih meningkatkan alokasi dana PNPB yang merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang paling baik dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung,
2. Dengan mengoptimalkan alokasi APBD bidang Pendidikan dan mengevaluasi kembali realisasi belanja bidang pendidikan agar lebih tepat sasaran dan mampu mengurangi kemiskinan
3. Dengan meningkatkan alokasi belanja kesehatan dan mengoptimalkan dalam merealisasikannya

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPM Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

4. Meningkatkan dana alokasi bidang Pekerjaan umum PU yang diarahkan pada keberpihakan pada masyarakat miskin (*pro poor*), penciptaan lapangan pekerjaan (*pro job*), dan peningkatan pertumbuhan (*pro growth*).

Daftar Pustaka

- Adi S Lukman. Pengaruh PNPM Dan Alokasi Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan, Dan Pekerjaan Umum Terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2009). Universitas Indonesia. 2011
- Abdulah, M. Natsir. 2008. Analisis Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Masalah Kemiskinan. Majalah Sinar, Edisi I/2008/nomor137, Jakarta.
- Atmawikarta, Arum, 2002. Investasi Kesehatan untuk Pembangunan Ekonomi. Bappenas. Jakarta
- Birowo, Tejo. 2011. *Relationship Between Government Expenditure And Poverty Rate In Indonesia (Comparison Of Budget Classifications Before And After Budget Management Reform In 2004)*. Graduate School Of Asia Pacific Studies Ritsumeikan Asia Pacific University Japan
- Buku Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri , Edisi Juli 2007.
- Buku PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan . Edisi Februari 2010
- Dinas Kesehatan. *Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2012.2013*
- DJPK(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah) Kementerian Keuangan Indonesia
- Esmara Hendra, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia* . Gramedia. Jakarta 1986
- Fan S, Hazell P & Thorat S. *Government Spending, Growth and Poverty in Rural India*. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 82, No. 4 (Nov., 2000), pp. 1038-1051
- Gujarati, Damodar.N. 2003. *Basic Econometrics. Fourth Edition*.
- Ijaiya.T Gafar , Ijaiya.A.Mukaila, Bello. A Raji & Ajayi. A Michael. *Economic Growth and Poverty in Rural India. International Journal of Business and Social Science*. Vol. 2 No. 15; August 2011

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPB Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

Jasmira, T., A. Bayhaqi, L. Trialdi dan Usman. 2001. Analisa Peringkat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 49 (4) : 423-451a, G

Kartasasmita, Ginanjar.1997.Kemiskinan.Balai Pustaka, Jakarta.

Muhajir, N.2000. Kebijakan dan Perencanaan Sosial. Edisi I. Rike Sarisin. Yogyakarta.

N. Gregory Mankiw. 2006. Makroekonomi Edisi 6, Erlangga:Jakarta

Prasetya F & WP Farah.2012. *Linkages Between Public Sector Expenditure On Economic Growth And Rural Poverty Of Indonesia*. ISSN 2090-4304 Journal of Basic and Applied Scientific Research

Rezeki DPS. Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program P2kp Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2000 - 2003). Universitas Diponegoro. 2006

Roberts J.2003. *Poverty Reduction Outcomes in Education and Health:Public Expenditure and Aid. Working Paper 210*. Overseas Development Institute 111 Westminster Bridge Road London SE1 7JD UK

Siagian JE. Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang. Universitas Sumatera Utara.2007

Solihin, Tasliman.2005.Evaluasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat. Pascasarjana IPB. Bogor

Sumodiningrat, G.1998. Membangun Perekonomian Rakyat. Pustaka Pelajar Bekejasama dengan IDEA. Yogyakarta

Suharto, Edi. 2001. Menyoal Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Media Indonesia, edisi 1 Maret 2001, Jakarta.

Toyamah N & Usman S. 2004.Laporan Lapangan. Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah : Implikasinya terhadapPengelolaan Pelayanan Pendidikan dasar. SEMERU. Jakarta

Qomariyah E, Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Larodange Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. Volume 7, Nomor 2.ISSN. 1907 – 0489. 2011

Todaro, Michael P., 2006, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta

Resha Moniyana Putri, Toto Gunarto, Ambya

Pengaruh PNPB Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung

Wilhem, Vera & Fiestas, Ignacio. Quoted Fan and Coady (2005). *Exploring the Link Between Public Spending and Poverty Reduction: Lessons from the 90s. World Bank Institute Working Paper. p.4.*

Widarjono. Agus . 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis.* Ekonisia. Yogyakarta

World Bank.(2005). *Introduction to Poverty Analysis.* World Bank Institute Working Paper. p.9.

World Bank.(2005). *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.* World Bank Institute Working Paper. p.xiii.

Policy Brief. Pola Investasi Infrastruktur Bidang PU Di Wilayah Barat Indonesia. Pusat Kajian Strategis. 2011

<http://www.pnpm-mandiri.org/>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bappenas.go.id>

<http://www.spm.depkes.go.id>